

Usai Rapat dengan Terkait, Pemkot Baubau Putuskan Membayar Lahan SDN 2 Wajo



Sekda Baubau Saido Bonsai pimpin rapat untuk menyelesaikan masalah SDN 2 Wajo terkait kepemilikan lahannya

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau dibawah kepemimpinan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan lahan SDN 2 Wajo. Setelah melakukan negosiasi dengan pihak ahli waris dan pengacara agar segel SDN 2 Wajo dibuka pada Minggu (21/4/2024) supaya bisa digunakan oleh guru-guru dan anak-anak untuk melakukan aktivitas proses belajar mengajar Senin (22/4/2024),

Kantor Pertanahan Busel Jadikan Momentum Gerakan Sinergi Reforma Agraria untuk Atasi Konflik Tanah



Pewartanya: Eron

BUSEL, BP-Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSRA) 2024 jadi mo-

mentum Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buton Selatan (Busel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) atasi konflik

tanah. GSRA merupakan kegiatan dari Kementerian Agraria dan Tata Ru-

Lanjutkan ke Hal: 7

Dibuka Wapres Ma'ruf Amin, Pj Gubernur Sultra Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2024



Laporan: Mashuri

BANDUNG, BP-Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra)

Andap Budhi Revianto menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi

Lanjutkan ke Hal: 7

Sebelum Diberangkatkan ke Mekah, Dinkes Baubau Periksa Kesehatan 156 Calon Jemaah Haji



Lanjutkan ke Hal: 7

Pemkot Baubau kembali mengambil sikap dengan dengan menggelar rapat melibatkan OPD terkait untuk menindaklanjuti permintaan dari

Lanjutkan ke Hal: 7

Pj. Bupati Buton Terima Penghargaan Terbaik 1 Percepatan Penurunan Stunting di Musrenbang Sultra



Pewartanya: Rahman

BUTON, BP-Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. mener-

ima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai Terbaik 1 atas Kinerja Pemerintah Ka-

bupaten Buton dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Upaya Percepatan

Lanjutkan ke Hal: 7



SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Usai Rapat dengan Terkait, Pemkot Baubau Putuskan Membayar Lahan SDN 2 Wajo

ahli waris dan pengacara terkait lahan SDN 2 Wajo pada Senin (22/4/2024) di ruangan Sekda Kota Baubau.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Pj Sekda Kota Baubau Saido Bonsai, S.Sos, M.Si, diputuskan jika Pemkot Baubau bersedia membayar lahan SDN 2 Wajo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan ini diambil setelah mendengar masukan dari peserta rapat yang hadir yakni Asisten I Setda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si, Asisten II Setda Kota Baubau Dra Hj Asmahani, M.Si, Kepala Bappeda Kota Baubau Dr Dahrul Dahlan, SSTP, M.Si, Kepala BPKAD Sitti Munawar, SSTP, M.Si,

Kadis Perkim dan Perencanaan Dra Hj Amalia Abibu, M.Si, Dr Moh Tasdik Kadispota Kota Baubau, Sekdin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bariun, SPd, M.Pd dan Kabit SD, Kabag Pemerintahan Simson Nanlohy, Perwakilan Kabag Hukum, Camat Murhum Asrul, SH dan Lurah Wajo Jalaluddin.

Asisten I Setda Kota Baubau La Ode Aswad yang membacakan hasil keputusan rapat tersebut mengungkapkan, Pemkot Baubau pada dasarnya sudah beritikad baik dengan menggelar rapat melibatkan OPD terkait dan hasilnya yakni lahan SDN 2 Wajo tersebut akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, diharapkan Lurah Wajo dan Camat Murhum agar me-

nyiapkan kompensasi penguasaan fisik tanah seperti yang dibuatkan pada SDN 3 Palatiga beberapa waktu yang lalu.

Kemudian, bagian aset membantu menginisiasi proses penghapusannya tentu setelah ada telaah di bagian hukum yakni dinilai dulu bagian hukum dan turun bersama Kabag Hukum diukur sampai dimana luasnya lahan SDN 2 Wajo. Hal ini dimaksudkan supaya tidak salah menilai kemudian keuangan, aset tidak salah menghapus. Dan setelah itu, Sekda melalui TAPD mengajukan penganggaran untuk disiapkan pendanaannya di perubahan anggaran dimana hal ini sudah tidak ada masalah lagi.

Disamping itu, Dinas Perkim dan Per-

encanaan Kota Baubau menyiapkan semua SOP yang dibutuhkan seperti usulan, penlok, kemudian FSnya disiapkan. Meskipun tidak terlalu panjang tapi jangan juga ada aturan yang dilangkahi sehingga sebelum KUA perubahan yakni bulan Juli 2024 maksimal sudah harus ada titik terangnya.

“Agar hasil rapat ini diketahui oleh ahli waris dan pengacara terkait itikad baik dari Pemkot Baubau untuk menyelesaikan masalah lahan SDN 2 Wajo maka diperintahkan kepada Camat Murhum Asrul dan Lurah Wajo Jalaluddin untuk menemui ahli waris dan pengacara untuk menyampaikan hasil kesimpulan rapat kepada ahli waris dan pengacara,” ungkap (*).

Sebelum Diberangkatkan ke Mekah, Dinkes Baubau Periksa Kesehatan 156 Calon Jemaah Haji

BAUBAU, BP- Sebanyak 156 Calon Jemaah Haji (CJH) mengikuti jalan santai di Stadion Utama Betoambari Baubau, Selasa (23/4/2024). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas kesehatan (Dinkes) Kota Baubau bersama Kantor Kementerian agama Kota Baubau.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Kota Baubau, Jaenuddin Ishak mengatakan, tujuannya mengukur kebugaran, kesehatan Calon Jemaah Haji sebelum di berangkatkan di mekah.

“Jadi pemeriksaan kebugaran, pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji (CJH) ini merupakan kegiatan ru-

tin Dinas kesehatan dan kita berkolaborasi dengan kementerian agama Kota Baubau,” katanya.

Jalan santai dimulai pada pukul 06.30 wita. Kata dia, Calon Jemaah Haji mengelilingi empat putaran di lapangan atau berjalan 1,6 KM, kemudian tenaga medis melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Apakah mereka masih bisa melakukan aktivitas atau tidak, kalau misalnya tidak bisa, maka dilakukan training khusus. Jadi tergantung fisiknya mereka,” katanya.

Pemeriksaan kebugaran atau aktivitas fisik tidak dipaksakan kepada Calon Jemaah Haji (CHJ) sebab usia

mereka cukup beragam dan kegiatan tersebut diselenggarakan selama satu hari.

“Aktivitas fisik, yang ringan-ringan saja, jadi kita tidak paksakan juga karena ini usianya cukup ada yang 70 dan ada yang di bawah 40,” katanya.

Informasi tambahan, sebelumnya Dinas kesehatan Kota Baubau telah melakukan vaksinasi terhadap Calon Jemaah Haji.

“Kita juga sudah melakukan vaksinasi, rentetan pemeriksaan kesehatan diserahkan di Dinas Kesehatan dengan melibatkan puskesmas, Vaksinasi Wajid sebab sebagai syarat.” tutup. (Alyakin)

Dibuka Wapres Ma'ruf Amin, Pj Gubernur Sultra Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2024

Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) bertempat di Pullman Hotel Bandung, Rabu (24/04/24).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan mengusung tema “Pembangunan Teknologi dan Inovasi Dalam Penanggulangan Bencana”.

Turut hadir pada kegiatan ini Dubes Swiss untuk Republik Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Menko PMK, Kepala BNPB, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BRIN, Gubernur/Pj Gubernur, Pimti Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga, para Bupati/Walikota, serta para Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dan Kab/Kota, akademisi, dan perwakilan badan usaha serta para pejabat terkait.

“Saat ini, penanggulangan bencana di Indonesia masih secara tradisional dan konvensional. Hal ini lah yang mendasari kami untuk terus berupaya melakukan pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana, selanjutnya kami tuangkan dalam tema tahun ini,” ujar Kepala BNPB Suharyanto saat mengawali laporannya.

Selanjutnya, Suharyanto memaparkan data kejadian bencana serta dampak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023.

“Pada 2023 lalu, terjadi kenaikan bencana sebesar 52%. Tapi, data statistik bencana menunjukkan kerusakan perumahan, kantor, Fasum, Fasos alamai penurunan, dimana pada

tahun 2021 pada angka 164.272 saat ini 35.933. Data lainnya yakni korban yang wafat juga alami penurunan sebesar 26%,” paparnya.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi geografis dan geologis yang rawan bencana. Pada tahun 2023, tercatat 5.400 kejadian bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi.

“Untuk itu, dirasa penting upaya penanggulangan bencana yang cermat dan inovatif serta langkah dan rencana tanggap darurat yang mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat didukung oleh komitmen dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan akan menurunkan indeks risiko bencana tingkat tinggi yang masih dialami sejumlah daerah,” kata Wapres.

Wakil Presiden juga menekankan penurunan risiko bencana merupakan Indikator Kinerja seorang Kepala Daerah. Para Kepala Daerah diminta memperhatikan mitigasi dampak bencana di wilayahnya masing-masing.

“Dengan memperhatikan mitigasi bencana di daerah akan turut memastikan terwujudnya kecukupan pangan, pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Selain itu, Wakil Presiden menekankan penanggulangan bencana yang preventif, penyelamatan dan rehabilitatif serta pentingnya kolab-

orasi bersama lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dan berkelanjutan.

Wakil Presiden mendorong pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana agar terus dikembangkan berbasis data yang valid untuk efektivitas dan efisiensi aksi dini kesiapsiagaan menghadapi bencana, sehingga harapannya akan terwujud penanggulangan bencana yang responsif dan adaptif serta masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Lebih lanjut, Wakil Presiden memberikan arahan kepada para Peserta, yakni :

Pertama, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi;

Kedua, lakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid;

Ketiga, perkuat pelayanan kebencanaan; *Keempat*, terapkan kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana;

Kelima, susun dan rencanakan pembiayaan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.

Pj Gubernur Sultra ditempat yang sama mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI serta Narasumber lainnya.

“Kami akan tindaklanjuti arahan Bapak Presiden, serta instruksi Bapak Wakil Presiden dan materi dari Narasumber. Hal ini sebagai komitmen kami untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman dan kondusif, serta lebih baik dari waktu ke waktu dalam memitigasi bencana seperti akurasi dalam identifikasi resiko

Kantor Pertanahan Busel Jadikan Momentum Gerakan Sinergi Reforma Agraria untuk Atasi Konflik Tanah

ang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diselenggarakan serentak di seluruh Kantah di Indonesia. Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buton Selatan (Busel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ungkap tantangan atasi konflik tanah di wilayahnya saat momen Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSRA) 2024.

Momen tersebut dijadikannya untuk mengajak seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga Pemerintah Daerah Busel bersama-sama mengatasi konflik tanah di Busel. GSRA merupakan kegiatan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diselenggarakan serentak

di seluruh Kantah di Indonesia, Pelaksanaan GSRA 2024 Kantah Kabupaten Busel, dilakukan di Balai Desa Lawela Selatan bersama masyarakat setempat, Senin (22/04/2024).

Kegiatan ini dihadiri Dinas Kominfo Busel, Dinas Koperasi Busel, termasuk Kepala Desa Lawela Selatan, Kepala Kantah Busel, Mateus Joko Slameto ,S.T.,S.SiT.,M.H mengatakan, Kementerian ATR/BPN hingga Kantah telah berjiabaku untuk mensertifikatkan seluruh bidang tanah. “Kami dari Kantor Pertanahan bekerja siang malam untuk mewujudkan seluruh bidang tanah terdaftar dan bersertifikat,” imbuhnya, kegiatan Reforma Agraria berarti melaku-

kan pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat.

“Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita petakan, lalu kita bahas bersama, bersinergi dengan pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait,” ucap Kantor Pertanahan tidak hanya berfungsi mensertifikatkan tanah, namun juga membantu meningkatkan kesejahteraan pemerintah daerah (pemda). “Dengan seluruh bidang tanah terdaftar, pemda mengetahui jumlah tanah, sehingga mengetahui besaran pajaknya,” jelasnya.

Adapun bidang tanah telah terdaftar dan berdaftar di Kabupaten Busel berkisar 95 persen dan yang belum bersertifikat berkisar 7 ribuan

bidang tanah atau setara dengan 5 persen.

Kepala Kantah Busel mengungkapkan, bahwa kondisi wilayah di Kabupaten Busel cukup berbeda dengan daerah lain.

Melalui GSRA 2024 dia berharap, masyarakat dapat mengetahui peran Kantor Pertanahan dalam peningkatan kesejahteraan. Mateus Joko Slameto ,S.T.,S.SiT.,M.H berkeinginan, agar Pemda Busel menyambut sinergi Kantor Pertanahan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi.

“Kendalanya adalah ada tanah kaum, tanah adat, dan banyaknya orang yang merantau, ini yang belum bisa kami masuki,” tutupnya. (*)

Pj. Bupati Buton Terima Penghargaan Terbaik 1 Percepatan Penurunan Stunting di Musrenbang Sultra

tan Penurunan Stunting Terintegrasi pada Tahun 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sultra di Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention Kendari, pada Kamis, 18 April 2024.

“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan stunting. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dari kita semua, para OPD

dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Buton,” ucap Pj. Bupati Buton.

Dalam acara tersebut Pj. Gubernur Sultra mengucapkan selamat kepada semua pihak yang menerima penghargaan atas kinerja yang dilakukan.

Pj. Gubernur juga menekankan pentingnya data sebagai base line atau dasar dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.

“Kabar gembira telah berlaku Perda Pemrov Sultra No.3 tahun 2024 tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi. Per-

aturan pertama di Indonesia yang bermuatan data dengan penekanan pentingnya integrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan berpedoman data dasar presisi,” jelasnya.

Kepala Daerah di Bumi Anoa ini usai acara tersebut dalam keterangannya menjelaskan kegiatan Musrenbang untuk menampung aspirasi dari kabupaten/kota dan juga menyampaikan data analisis-analisis kita.

“Disamping itu kita juga melihat lingkungan strategis dan juga kondisi eksisting yang ada sehingga dokumen perencanaan ini

tidak asal-asalan bukan sekadar jadi tapi benar-benar memuat suatu produk yang berkualitas didasari kemampuan daerah,” ucapnya.

Hadir dalam acara tersebut bupati/walikota se-Sultra, Forkopimda se-Sultra, mewakili Mendagri Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo AP, M.Si., mewakili Menteri PPN/Bappenas Direktur Pangan dan Pertanian Dr.Vivi Yulaswati, MSc., Sekretaris Daerah Prov. Sultra Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Forkopimda Sultra dan Kabupaten Kota, dan seluruh stake holder. (*)

Perjuangan Panjang Prabowo Subianto Jadi Presiden ke-8



Prabowo Subianto resmi ditetapkan sebagai Presiden terpilih lewat Pilpres 2024.

Laporan: Hadi

JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih lewat Pilpres 2024. Prabowo bakal menjadi presiden Indonesia kedelapan menggantikan Presiden Joko Widodo yang akan resmi lengser Oktober 2024 mendatang. Berikut jejak panjang Prabowo sejak lahir hingga menjadi Presiden ke-8 RI yang telah dirangkum

Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada hari Rabu, 17 Oktober 1951. Dirinya merupakan anak ketiga dari Soemitro Djojohadikusumo. Soemitro sendiri merupakan seorang ekonom dan juga politisi dari Partai Sosialis Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada April 1952 dan Menteri Keuangan pada Agustus 1955.

Ibu dari Prabowo sendiri bernama Dora Marie Sigar, seorang blasteran Manado-Jerman Protestan yang berasal dari Minahasa.

Prabowo juga merupakan seorang cucu dari Margono Djojohadikusumo yang merupakan pendiri Bank Negara Indonesia. Keluarga Djojohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, seorang panglima laskar Pangeran Diponegoro.

Itu artinya Prabowo masih memiliki keturunan bangsawan dari kesultanan Mataram.

Prabowo pernah tinggal di beberapa negara baik di Asia maupun Eropa. Prabowo pernah bersekolah di Victoria Institution, Kuala Lumpur, Malaysia; Zurich International School, Zurich, Swiss; dan The American School di London, Inggris.

Dirinya harus tinggal berpindah dari satu negara ke negara lain setelah ayahnya melakukan keterli-

batan dalam pemberontakan dengan Pemerintah Revolusioner Indonesia menentang Presiden Soekarno.

Karir Militer Prabowo

Prabowo bergabung ke Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1970 dan lulus pada tahun 1974. Itu artinya saat masih mengenyam pendidikan, Prabowo sempat satu pendidikan dengan presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lulus pada tahun 1973.

Setelah lulus, Prabowo baru memulai karir militernya pada tahun 1976 dengan bergabung sebagai Letnan Dua di TNI Angkatan Darat.

Prabowo berkarir di militer selama 28 tahun. Dirinya pernah menerima beberapa jabatan, diantaranya Komandan peleton di Grup I/Para Komando tahun 1977, Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 tahun 1985, Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 tahun 1991, Komandan Grup 3/Sandi Yudha unit kontra-insurjensi Kopassus tahun 1993, dan Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal tahun 1995.

Pada tahun 1998, Prabowo dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya pada saat itu. Hal ini membuat

Dewan Kehormatan Perwira yang dipimpin oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo mengevaluasi Prabowo atas tujuh tuduhan, termasuk kesalahan dalam analisis tugas dan operasi yang bukan kewenangannya, serta sering bepergian ke luar negeri tanpa izin.

Selama persidangan, Prabowo mengklaim sebagai tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan sering memilih untuk bungkam. DKP memutuskan Prabowo bersalah atas ketidakpatuhan, perampasan kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Pidana dan Militer.

Karir Politik Prabowo

Pada tahun 2004, Prabowo mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Sayangnya pada saat itu Prabowo kalah suara, sehingga harus merelakan pencalonannya tersebut.

Prabowo menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Golkar hingga dirinya mengundurkan diri dari partai pada tahun 2008.

Setelah mengundurkan diri, Prabowo memutuskan untuk mendirikan partai bersama beberapa rekannya yang diberi nama Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada

saat itu Prabowo menjabat sebagai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan Suhardi sebagai Ketua Umum Partai.

Prabowo mulai menggantikan Suhardi sebagai Ketua Umum pada tahun 2014.

Pada tahun 2008, Gerindra memutuskan untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009.

Namun, setelah melewati proses politik Gerindra memutuskan untuk menempatkan Prabowo sebagai calon wakil presiden dengan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden.

Pada pemilu tahun 2009, pasangan Megawati-Prabowo hanya memperoleh 26,79 persen suara serta harus mengakui keunggulan pasangan SBY-Boediono yang menerima 60,8 persen suara.

Pada tahun 2014, Gerindra mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden. Dirinya berpasangan dengan ketua umum PAN Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Pada pemilu ini Prabowo-Hatta berhadapan dengan pasangan Jokowi-JK.

Pasangan Prabowo-Hatta hanya menerima 46,85 persen suara, kalah dari pasangan Jokowi-JK yang memperoleh 53,15 persen suara.

Pada tahun 2019, Gerindra kembali mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden. Pada pemilu ini, dirinya berpasangan dengan mantan wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Prabowo kembali berhadapan dengan Jokowi yang saat itu dipas-

AHY Laporkan ke Jokowi 2.086 Hektare Lahan IKN Masih Bermasalah

Laporan: Listar

JAKARTA - Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan sebanyak 2.086 hektare lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur masih bermasalah.

AHY telah melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui rapat internal terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4).

"Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektare yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan dalam pembangunan IKN," kata AHY.

"Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya. Di sinilah tadi kami melaporkan kepada bapak Presiden," imbuhnya.

AHY mengatakan dari ribuan hektare lahan itu, tidak semuanya menjadi lahan prioritas untuk pembangunan inti IKN. Ia menjelaskan lahan bermasalah yang ditargetkan pemerintah untuk pembangunan di antaranya adalah pengendali banjir di Sepaku yang luasnya kurang lebih 2,75 hektare dengan kurang lebih 22 bidang tanah.

Kemudian, ada pula lahan yang aman dijadikan jalan tol atau bebas hambatan, khususnya seluas 44,6 hektare atau sekitar 48 bidang tanah.

"Yang jelas bagi kami prinsipnya adalah harus clean and clear dulu lahan yang ada, kemudian baru kita bisa keluarkan sertifikat hak pakainya untuk digunakan semaksimal mungkin," jelas AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY juga menyatakan Presiden

Jokowi mewanti-wanti kepadanya untuk berhati-hati ihwal pembebasan lahan di IKN. Upaya persuasif dan jual untung, menurutnya, harus diupayakan.

Ia menjelaskan jika warga tidak berniat menjual tanah, maka pemerintah harus memindahkan warga tersebut pada lokasi atau lahan yang lebih baik dan tetap menguntungkan alias tidak merugikan warga setempat.

"Yang jelas penekanan dari Bapak Presiden yang kami catat tentunya, pertama, dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di lapangan kita harus pendekatannya dengan baik. Tidak boleh ada yang menjadi korban masyarakat yang seharusnya kita lindungi tidak boleh merugi, apalagi menjadi korban," ujar putra sulung SBY itu. (*)

Airlangga: Jokowi dan Gibran Keluarga Besar Golkar, Tinggal Formalitas

Laporan: Hadi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka sudah jadi bagian dari keluarga besar partainya. Dia menyatakan keanggotaan Jokowi dan Gibran di Golkar tinggal menunggu formalitas.

"Jadi, bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja," kata Airlangga usai menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4).

Airlangga juga mengakui Jokowi dan Gibran sudah mempunyai kedekatan dengan Golkar sejak lama.

Angkan dengan Ma'ruf Amin.

Prabowo-Sandi hanya menerima 44,5 persen suara, kalah dari pasangan Jokowi-Ma'ruf yang menerima 55,5 persen suara.

Setelah tiga kali kalah dalam rangkaian pemilihan umum presiden, Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan dalam kabinet Indonesia Maju.

Dirinya diberi ja-

bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi selama dua periode.

"Tentu partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama partai Golkar di dalam dua periode beliau," ujarnya.

Selain itu, lanjut Airlangga, Golkar merupakan salah partai pengusung Gibran di Pilpres 2024. Ia menegaskan Gibran mendapatkan rekomendasi maju jadi calon wakil presiden melalui rapat pimpinan nasional Golkar.

"Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar, dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Golkar melalui mekanisme rapimnas

resmi," ucap dia.

Sementara itu, elite PDIP Komaruddin Watubun menyebut Jokowi dan Gibran berseberangan dengan PDIP di Pilpres 2024. Dia pun menilai mustahil Jokowi masih menjadi bagian dari PDIP.

Ia secara khusus bahkan menyebut Gibran telah dua kali berbohong karena sempat mengaku akan bertahap di PDIP.

"Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau dibidang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja," ucap Komaruddin di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/4).

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu [maju cawapres]," imbuhnya. (*)

batan oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menthan). Dirinya dilantik pada bulan Oktober 2019 dan menjabat hingga tahun 2024. Hingga akhirnya pada tahun 2024 Gerindra kembali mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024.

Pada pemilu tahun 2024, Prabowo dipasangkan dengan putra pertama Jokowi yang menjabat sebagai Wa-

likota Solo bernama Gibran Rakabuming Raka. Dirinya berhadapan dengan dua calon yaitu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Pada Pilpres 2024 Prabowo akhirnya keluar sebagai pemenang. Pasangan Prabowo-Gibran berhasil memperoleh 59,59% suara mengungguli pasangan Anies-Muhaimin yang hanya memperoleh 24,95 persen suara. (*)

Pameran UMKM Meriahkan Jambore Kader PKK Ti. Provinsi di Kabupaten Konawe



Pewarta: Mashuri

KONAWE, BP- Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Jambore PKK, salah satu kegiatan yang ramai dikunjungi masyarakat adalah pameran UMKM. Pameran UMKM ini sukses menarik perhatian masyarakat dan peserta acara dalam upaya memajukan ekonomi lokal, macam-macam produk unggulan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipamerkan dengan bangga oleh para kader pkk kecamatan sekabupaten konawe.

Ketua Panitia Jambore PKK, Ibu Muana Asrun Lio, mengungkapkan, "Pameran ini bukan hanya sekadar ajang promosi, tetapi juga merupakan wujud dukungan kami terhadap para pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing dan memperluas pasar."

Selain itu, pameran tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal produk-produk lokal yang berkualitas dan memiliki potensi untuk bersaing di pasar lokal maupun

nasional, tidak kalah menariknya dari stan kader pkk kecamatan secara langsung mendemonstrasikan proses pembuatan kue baru atau bagea dengan bahan dari sagu serta proses pembuatan kripik pisang.

Antusias pengunjung ini dimanfaatkan dan berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para pemilik usaha, memperoleh informasi lebih lanjut mengenai produk, serta melakukan transaksi pembelian langsung di tempat.

Dengan semangat kewirausahaan yang kental, pameran UMKM di Jambore PKK tahun ini berhasil menciptakan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan umumnya di Sulawesi Tenggara terkhusus di Kabupaten Konawe itu sendiri.

Kami mendatangi salah satu stand yang ramai dikunjungi oleh warga. Disela-sela kunjungan kami berkes-

empatan berinteraksi dengan Camat Tongauna di stand pameran PKK Kecamatan Tongauna, Iskandar, S.Sos. Pak Camat memberikan informasi harga-harga barang komoditas hasil pertanian yang dipamerkan kader PKK nya, utamanya harga beras unggulan (putih) yaitu 5 kg dengan harga Rp.65.000, 10 kg Rp 130.000, sedangkan beras merah yang juga unggulan perki-lonya Rp.20.000 dan untuk perliter 15.000. Harga yang ditawarkan Kader PKK Kec. Tongauna ini diserbu warga, karena harga diluar-nya berkisar perkilonya lebih tinggi dari harga di stand pameran kader PKK nya. (*)

Satpol PP Provinsi Sultra dan Kominfo di Kota Kendari Tinjauan Langsung Penanggulangan Banjir

Pewarta: Mashuri

SULTRA, BP- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) melakukan tinjauan langsung terhadap situasi banjir yang melanda Kota Kendari, sesuai arahan Pj. Gubernur terkait penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.

Banjir yang melanda wilayah Kota Kendari menyebabkan satu rumah warga di Kelurahan Sanua Lorong Fajar Merantau, Kecamatan Kendari Barat, mengalami kerusakan parah. Rumah tersebut milik Ibu Isranida. Namun, dengan sigap, pihak berwenang bersama dengan Tim Tanggap Darurat Satgas Penanganan Bencana Alam Satpol

PP Provinsi Sultra, bersama Kominfo, yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Provinsi Sultra, melakukan tinjauan langsung di lokasi banjir.

Hasil tinjauan menunjukkan bahwa beberapa rumah warga tergenang air setinggi 20 cm, namun dapat diantisipasi dan telah mengalami surut sebelum tim tiba di lokasi. Tim

Satgas Penanganan Bencana Alam Satpol PP Provinsi Sultra juga memberikan bantuan alakadarnya kepada salah seorang warga yang rumahnya mengalami longsor.

Dalam upaya mengurangi risiko dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti pe-

Mempererat Silaturahmi, IKA Unhas Sultra Halal Bihalal



Pewarta: Lisna

KENDARI – Mempererat hubungan tali silaturahmi yang selama ini telah terbangun harmonis dibawah kepemimpinan Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D, maka Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali melaksanakan kegiatan halal bihalal, Sabtu (20/4/2024), di Kendari.

Kegiatan halal bihalal tersebut, dibuka secara langsung oleh Ketua IKA Unhas Koordinator Wilayah Sultra, juga selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D. Turut hadir uzatad Dr. H Sukring Syamsuddin.,M. Pdi, Sekretaris IKA Unhas Sultra, Andi Syahrir.,STP.,MSi, serta para alumni Unhas Wilayah Sultra lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua IKA Unhas Koordinator Wilayah Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin setiap tahunnya, terlebih setelah melak-

sanakan Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1445 H/2024 M.

“Terimakasih kepada seluruh para alumni IKA Unhas Wilayah Sultra yang telah menyempatkan hadir dalam acara ini. Pertemuan seperti ini, merupakan agenda rutin kita dan merupakan salah satu program kerja IKA Unhas Sultra, dalam rangka lebih mempererat tali silaturahmi yang selama ini telah terjalin harmonis,” tutur lulusan S3 The Australian National University of Canberra ini.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra ini melanjutkan, dalam pertemuan yang dilakukan tersebut, sekaligus sebagai ajang untuk sharing dan evaluasi pelaksanaan program-program organisasi, utamanya keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah dan turut serta menyukseskan program pemerintahan, serta bagaimana tetap berkontribusi kepada masyarakat, baik bidang sosial

hingga keagamaan seperti yang dilakukan saat ini.

“Karena kita masih berada di Bulan Syawal, maka tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1445 H, mohon maaf lahir dan batin,” ucap Mantan Kepala Pusat Studi Eropa UHO ini.

Usai ceramah yang disampaikan oleh Uztad Dr. H Sukring Syamsuddin.,M. Pdi, mantan Kepala Sekretariat Rektor UHO ini, Asrun Lio mengatakan, salah satu hikmah ceramah yang dapat dipetik bahwa pemberian maaf terpuncak yakni disertai dengan perbuatan baik kepada orang yang pernah berbuat jahat.

“Melalui kegiatan halal bihalal ini juga, para pengurus hingga anggota IKA Unhas Wilayah Sultra dapat bersilaturahmi secara langsung dan saling berjabat tangan untuk saling maaf memaafkan, sekaligus melakukan evaluasi terhadap program-program kerja,” tutup mantan Konsultan Proyek Peningkatan Mutu SLTP ini. (*)



tunjuk evakuasi yang telah ditetapkan. Masyarakat juga dimin-

ta untuk tetap tenang dan saling memban-

tu dalam menghadapi situasi ini. (*)

Ahali Buka Diklat BST KLM Untuk Meningkatkan Kompetensi Pelayaran



Laporan: Kasrun

BURANGA, BP-Wakil Bupati Buton Utara, Ahali, memberikan sambutan pada pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan di Hotel HB Kulisusu pada Senin, 22 April 2024.

Diklat ini diikuti oleh 100 peserta selama 6 hari, hasil kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara dengan Politeknik Barombong Makassar.

Dalam sambutannya, Ahali mengapresiasi program Diklat sebagai bagian dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara dalam meningkatkan sumber daya manusia.

“Kami sangat mengapresiasi, karena salah satu visi misi pemerintah daerah Butur adalah meningkatkan sumber daya manusia, dan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya tersebut,” katanya.

Ia menekankan pentingnya pelatihan ini dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan peserta, yang diharapkan dapat memberikan

kontribusi positif bagi program pemerintah di wilayah tersebut.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang luas terhadap program pemerintah. Kabupaten Butur berhadapan langsung dengan laut Banda, menjadi poros/lintasan pelayaran wilayah timur-barat, dan memiliki potensi perikanan yang san-

gat bagus, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pelayaran, “ujarnya. Ahali juga mengingatkan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman teori dan keterampilan peserta dalam menangani persoalan pelayaran.

Turut hadir Direktur Politeknik Barombong yang diwakili oleh Kapten Fahri, serta Kepala Dinas Perhubungan dan sejumlah sahabat nelayan dari cabang Kabupaten Buton Utara. (*)

Pj Bupati Buteng Andi Muh Yusuf Hadiri Hari Jadi ke 625 Kabupaten Wajo



Laporan: Ardi

Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf didampingi Pj Ketua TP PKK Buton Tengah, Asriani Yusuf menghadiri semarak puncak perayaan

Hari Jadi ke-625 Kabupaten Wajo yang berlangsung di lapangan Merdeka Sengkang, Senin (22/4/2024).

Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Wajo tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur

Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, Pj Bupati Wajo, Andi Bataralifu beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Wajo.

Acara puncak perayaan Kabupaten Wajo ke-625

mengangkat tema “Merajut Sutera Merangkai Nusantara RI Tana Wajo”, juga bertepatan dengan Hari Bumi, memperkuat komitmen daerah dalam pelestarian lingkungan. (*)

Pawai Taruf Meriahkan Pembukaan MTQ XLVIII Kabupaten Buton



Pewartu: Rahman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton menggelar Pawai Ta'aruf Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-48 Tingkat Kabupaten Buton di Lapangan Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Selasa 16 April 2024.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Buton bersama ibu Kiki Amalia Asnawi, Ketua DPRD Kabupaten Buton, Ny. Wa Ode Nurnia Kahar, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Ledrik Viktor Mesak Takaendengan, SH, MH bersama Ny. Monalisa Ledrik Takaendengan, Para

Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton, Muchtar, SAG, MA, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Buton, Staf Ahli dan Para Kepala OPD Lingkup Pemdah Buton.

Pawai ta'aruf diikuti seluruh kecamatan se-Kabupaten Buton dengan mengenakan busana muslim berjalan mulai dari Lapangan Pasarwajo hingga Lapangan Banabungi.

Pawai ta'aruf diawali dengan penampilan Marching band Gita Takawa membawakan dua lagu Mars MTQ dan lagu religi yang berjudul Rahmatan

Lil Alamin dan dilanjutkan dengan kafilah dari Kecamatan Kapontori, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Wabula, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Pasarwajo.

Pawai Taruf diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi mewakili Pj Bupati Buton.

Setelah Pawai Ta'aruf berlangsung akan dilanjutkan pembukaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-48 Tingkat Kabupaten Buton Tahun 2024 di tempat yang sama pada malam hari. (*)

Pj Bupati Buton Tegaskan Tradisi Boneatiro, Kangaru Harus Dilestarikan

Pewartu: Rahman

BUTON, BP-Pj Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi yang didampingi Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi menyaksikan langsung acara Budaya kangaroo yang digelar Masyarakat Boneatiro, Kecamatan Kapontori, di lapangan Futsal Desa Boneatiro, Senin, 15 April 2024.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Kabupaten Buton itu menyebut budaya Kangaru merupakan salah satu upaya melestarikan budaya lokal yang kian tergerus perkembangan zaman.

“Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Buton sebagai wilayah eks Kerajaan dan Kesultanan Buton yang terkenal di nusantara dan kaya akan budaya yang patut kita lestarikan,” tuturnya.

“Namun tak dapat dipungkiri perkembangan zaman dan teknologi dapat mengikis nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, kegiatan pagelaran budaya Mangaru adalah salah satu upaya untuk melestarikan

budaya yang ada di Buton,” lanjut Pj Bupati Buton.

Sementara itu, Kepala Desa Boneatiro, Muhammad Nuryadin, dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat menyukseskan kegiatan tersebut.

Nuryadin juga mepresentasikan beberapa potensi yang ada di Desa Boneatiro. Salah satunya adalah penyuplai ikan “kaholeo”.

“Desa Boneatiro sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan, kurang lebih 80 persen, dan menjadi salah satu daerah penyuplai ikan. Potensi di Boneatiro ini juga terutama ikan kaholeo ikan asap, walau hingga kini penjualannya belum maksimal. Mohon kiranya bisa dibantu hingga kaholeo ini bisa di kenal hingga seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dari informasi yang diperoleh, pengunjung pagelaran tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Buton, tetapi juga terdapat pengunjung dari Kota Baubau, Buton Tengah, Buton Selatan

dan Buton Utara.

Telah menjadi tradisi di setiap tahun, pasca hari raya Idul Fitri, masyarakat Desa Boneatiro, Kecamatan Kapontori, Buton, menggelar budaya adat “Kangaru”.

Kangaru/mangaru merupakan tarian bela diri Kesultanan Buton. Tarian tersebut hingga kini masih dilestarikan masyarakat Buton.

Di tahun ini, Kangaru Desa Boneatiro berlangsung meriah. Pasalnya, pesertanya bukan hanya dari Desa setempat, melainkan ada juga dari luar Desa Boneatiro.

Hadir pula Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Diskominfo, Danpos Angkatan Laut Kota Baubau, Camat Kapontori, sejumlah Kepala Desa lingkup Kecamatan Kapontori.

Pagelaran Kangaru Boneatiro tahun ini mengusung tema “Satu untuk Semua, Semua untuk Satu dalam Bingkai Harmoni. (*)

ASN Baubau Cek Kesehatan dan Tes Urine Sampling Pasca Lebaran



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Baubau usai melaksanakan apel gabungan di halaman kantor Wali Kota Baubau langsung melakukan cek kesehatan gratis dan tes urine sampling oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di aula kantor Kantor Wali Kota Baubau Palagimata Senin (22/4/2024).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau dr Lukman, SPPD saat ditemui di aula palagimata mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Baubau atas dukungannya dengan terselenggaranya kegiatan pemeriksaan deteksi dini terhadap penyakit

tidak menular yang juga kali ini bekerjasama dengan BNN Kota Baubau untuk deteksi narkoba pada beberapa sampling ASN.

dr Lukman berharap dengan kegiatan ini kembali bugar, kembali fit pasca menjalani puasa dan lebaran. Apalagi dik-

etahui bersama bahwa kalau sudah habis puasa dan lebaran tentu mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol dan lain sebagainya. Disamping itu, bisa memberikan informasi kesehatan buat ASN dan itu bisa dipakai sebagai langkah-langkah kontrol se-

lanjutnya. "Dan yang di periksa kali ini untuk penyakit tidak menular ada tes fisik secara umum kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium secara sederhana ada pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula darah, juga cek penyakit menular dan juga pemeriksaan narkoba dari BNN. Kami juga menyiapkan obat apabila diperlukan," ujarnya.*

Selaraskan Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah, Pemerintah Susun Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)

Laporan: Yeti

TANGSEL, BP-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar program pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah terintegrasi dengan pemerintah pusat untuk menghasilkan kemajuan yang signifikan.

Presiden menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat

Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (24/4).

"Itu sebabnya pembangunan kesehatan daerah harus melibatkan Bappeda agar rencana pembangunan kesehatan di masa depan terintegrasi," kata Presiden saat membuka Rakerkesnas 2024 di ICE BSD, Tangerang

Selatan, Rabu (24/4). Presiden menyatakan, perlu ada rencana pembangunan kesehatan jangka panjang, jangka menengah, serta Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sebagai acuan bagi pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam melakukan pembangunan kesehatan.

"Semuanya harus sinkron, semuan-

ya harus in line, semuanya harus satu garis lurus, mana yang harus dikerjakan. Jangan berjalan sendiri-sendiri, kalau dikerjakan sendiri, tidak ada hasilnya," kata Presiden.

Untuk menyelaraskan rencana pembangunan pusat dan daerah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

temuan Rakerkesnas 2024 yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, selama dua hari, yakni 24 dan 25 April 2024.

Acara bertema "Transformasi Kesehatan: Melesat Menuju Indonesia Emas" ini dihadiri oleh sekitar 2.100 peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, Bappeda provinsi/kabupaten/kota, UPT Kemenkes, perwakilan ke-

menterian/lembaga, dan para mitra pembangunan kesehatan lainnya.

"Itu sebabnya pagi hari ini kita ingin mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan untuk menghasilkan sebuah langkah konkret dari masalah-masalah kesehatan yang kita miliki," tutur Kepala Negara.

Dalam laporannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan menjadi landasan strategis untuk mencapai target kesehatan pada masa depan.

Dalam penyusunan RPJMN ini, Kemenkes turut memasukkan satu konsep kesehatan baru, yakni dari mengobati orang sakit menjadi menjaga orang tetap sehat.

"Kami memasukkan konsep baru ini dalam transformasi



kesehatan, dengan mengajak partisipasi 514 kabupaten/kota dan provinsi, bukan hanya kepala dinas, tapi juga mengajak kepala Bappeda, termasuk dirut RSUD, yang kita undang untuk datang," kata Menkes.

Menkes menjelaskan pelibatan Bappeda dalam Rakerkesnas 2024 untuk mendapatkan masukan-masukan penting dalam penyusunan RIBK yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.

Penyusunan RIBK selaras dengan am-

anat UU Kesehatan 17 Tahun 2023 yang mengubah paradigma dalam perencanaan kesehatan, dari program mengikuti anggaran (program follow money) menjadi anggaran mengikuti program (money follow program).

Dalam paradigma ini, anggaran kesehatan tidak dipatok 5 persen atau 10 persen, melainkan sesuai dengan kebutuhan/prioritas program.

Menkes berharap RIBK nantinya dapat menjadi sebuah pedoman nasional yang diacu oleh pemerintah pusat dan pemer-

intah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya.

Bersamaan dengan penyusunan RIBK, Menkes juga menginginkan agar pelaksanaan Rakerkesnas 2024 menjadi sebuah momentum yang baik untuk mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan seluruh kekuatan serta program dari semua komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.*



DURASITIMES
Tiap Saat Adalah Berita

Wartawan Durasi Times tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik

Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Durasi Times dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Durasi Times, segera menghubungi Kantor Redaksi Koran Online Durasi Times

Segala Berita yang diterbitkan oleh Durasi Times merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisna

Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan dan Pemasaran : Nabila D.A
Manager Iklan : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Konflik Pimpinan KPK Nurul Ghufron dan Anggota Dewas Albertina Ho



Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terlibat konflik dengan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho

Laporan: Hamid

JAKARTA -- Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terlibat konflik dengan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho. Ghufron melaporkan Albertina ke Dewas KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Ghufron menjelaskan mempunyai hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik insan komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perdwes Nomor 3 Tahun 2021.

"Materi laporan saya dugaan penyalahgunaan wewenang berupa meminta hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK, padahal Dewas sebagai lembaga pengawasan KPK bukan penegak hukum dan bukan dalam proses penegakan hukum (bukan penyidik) karenanya tak berwenang meminta analisis transaksi keuangan terse-

but," ujar Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu (24/4).

Albertina sudah buka suara merespons langkah Ghufron tersebut. Ia memastikan permintaan analisis transaksi keuangan tidak melanggar kode etik karena telah disepakati seluruh anggota Dewas KPK.

"Masalah koordinasi dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk permintaan informasi tentang transaksi keuangan yang mencurigakan dalam pengumpulan bukti-bukti kasus jaksa TI yang dilapor-

kan diduga melanggar etik karena menerima gratifikasi/suap," tutur Albertina.

"Saya mewakili Dewas dalam melakukan koordinasi dengan PPATK karena saya yang ditunjuk sebagai PIC masalah etik. Jadi, saya dilaporkan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewas KPK," imbuhnya.

Kolega Albertina, Syamsuddin Haris, mengaku heran dengan langkah Ghufron. Ia menegaskan permintaan analisis keuangan kepada KPK merupakan keputusan kolektif kolegial.

Dewas KPK, terang

Syamsuddin, telah meminta klarifikasi termasuk kronologi terhadap Albertina.

"Intinya, bu AH berkoordinasi dengan PPATK dalam rangka pelaksanaan tugas karena beliau adalah PIC (person in charge) masalah etik di Dewas. Saya juga tidak mengerti mengapa pak NG laporkan bu AH," ucap Syamsuddin.

"Semoga saja bukan karena saat ini pak NG sendiri memiliki kasus etik yang sedang ditangani oleh Dewas terkait dugaan penyalahgunaan pengaruh sebagai insan KPK dalam mutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian berinisial ADM," tandasnya. (*)

vid-19.

Dalam penanganan kasus dugaan korupsi APD di Kemenkes, KPK sudah lebih dulu memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Seperti mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus; Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Oscar Primadi; Direktur PT GA Indonesia Song Sung Wok; Dokter Anestesi pada RSUD Lembang Sri Lucy Novita; Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti

Fatimah Az Zahra; Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik; dan lainnya.

KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Tempat dimaksud seperti Kantor BNPB, Kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, salah satu ruangan di Kantor LKPP dan rumah kediaman dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

2 Anak Buah SYL Bertemu Ahmad Ali NasDem saat Kasus Kementan Diusut

Laporan: Hamid

JAKARTA- Dua anak buah eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono disebut bertemu Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali saat kasus dugaan gratifikasi di Kementerian Pertanian diselidiki oleh KPK.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dengan terdakwa SYL, Kasdi dan Hatta di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Dalam persidangan, awalnya hakim bertanya soal penyelidikan kasus di Kementan kepada mantan Sespri Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, Merdian Tri Hadi.

"Apakah pada saat itu pada bulan Juni 2023 itu, sudah ada penyelidikan dari KPK mengenai kasus yang ada di Kementan?" tanya hakim.

"Penyelidikan sudah mulai dari April Yang Mulia," jawab Merdian. Hakim lalu bertanya apakah Merdian pernah mendampingi Kasdi untuk bertemu dengan seorang petinggi NasDem ketika kasus di Kementan tengah diselidiki KPK.

"Begitu ketahuan ada penyelidikan dari KPK, sehubungan dengan anggaran di Kementan itu, apakah saudara pernah mendampingi Pak Kasdi ya, terdakwa Kasdi dan Muhammad Hatta untuk pergi ke rumah salah seorang anggota partai politik dari NasDem?" tanya hakim. Merdian lalu mengaku pernah mendampingi Kasdi dan Hatta bertemu Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali di salah satu perumahan wilayah Jakarta Barat.

Namun ia mengaku tidak tahu apa yang dibicarakan Kasdi, Hatta dan Ali, karena hanya menunggu di parkiran.

Setelahnya, hakim

kembali mencecar Merdian soal kedatangan Kasdi ke NasDem Tower.

"Kemudian, selanjutnya dari pertemuan itu pada bulan Juni 2023 ya, apakah ada tindak lanjut kemudian?" tanya hakim.

"Ada pertemuan selanjutnya di kantor DPP NasDem," ujar Merdian.

Ia mengatakan awalnya Hatta menelpon Kasdi untuk janji datang berdua. Namun, Hatta batal ikut, sehingga hanya Kasdi yang datang ke NasDem Tower.

Ia mengaku tidak tahu Kasdi bertemu dengan siapa di NasDem Tower. Namun Merdian mengaku tidak melihat SYL saat itu. "Apakah masih menghadap Pak Ahmad Ali, pembicaraan awal atau sudah dengan ketua?" tanya hakim.

"Saya tidak tahu Yang Mulia, karena tidak ikut ke dalam Yang Mulia. Pak Kasdi dijemput di bawah, saya tidak ikut," katanya.

Media ini telah meminta konfirmasi kepada Ahmad Ali terkait kesaksian tersebut, namun belum mendapat respons hingga berita ini tayang.

Di perjalanan pulang dari NasDem Tower, Merdian menyebut Kasdi ditelpon oleh Hatta. Saat itu, kata dia, Hatta memberi sebuah nomor telepon kepada Kasdi.

"Apa yang mereka bicarakan?" tanya hakim. "Pak Kasdi hanya diberikan nomor sama Pak Hatta diminta 'Pak Sekjen tolong hubungi ke nomor ini,'" jawab Merdian. Kasdi lalu melakukan panggilan video terhadap nomor tersebut. Saat itu, menurutnya, orang pertama yang mengangkat panggilan, lalu memberi telepon kepada orang kedua.

Merdian menyebut ada pembahasan soal KPK dalam panggilan video itu.

"Siapa orang kedua itu? Apakah masih tetap orang KPK?"

tanya hakim. "Saya tidak tahu, cuma dari pembahasannya membicarakan soal ketua," ujar Merdian.

Dalam pembicaraan itu, Merdian juga menyebut Kasdi sempat diingatkan oleh sosok di seberang telepon.

"Yang pertama Pak Kasdi ditegur sama orang di sana bahwa 'Kementan hati-hati jangan sampai salah orang lagi, jangan sampai ada orang yang mengatasnamakan ketua'," ujar Merdian.

Selain itu, ia mengatakan ada pembicaraan soal angka 5 dan dolar dalam telepon tersebut. Hakim bertanya siapa 'ketua' yang dimaksud.

"Maksudnya ini ketua apa? ketua KPK?" tanya hakim.

"KPK, Jadi Pak Kasdi minta 'izin bapak arahan bagaimana', hanya menanyakan bagaimana arahnya, 'ya udah siapkan saja 5 nanti kami atur,'" ujar Merdian.

Menurutnya, Kasdi bertanya maksud dari angka 5 itu. Ia mengatakan orang di seberang menjawab dolar, namun tidak menyebut juta atau ribu. "Pak Kasdi menanyakan 5 apa maksudnya, yang pihak sana menjawabnya dolar. Pak Kasdi bilang 'baik pak saya koordinasikan dulu,'" kata Merdian.

Dalam kasus ini, SYL, bersama dengan dua terdakwa lainnya, yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, didakwa melakukan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam jumlah yang signifikan selama periode 2020-2023. SYL didakwa melakukan pemerasan hingga mencairkan Rp44.546.079.044 dan menerima gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp40.647.444.494 selama periode 2020-2023. (*)

KPK Terima Pengembalian Rp500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Kemenkes

Pewarta: Alwan

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang dari Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo selaku tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Uang itu diterima KPK saat memeriksa Satrio dalam kapasitasnya sebagai saksi, Jumat (19/4).

"Tim penyidik juga menerima pengembalian uang Rp500 juta," ujar Kepala

Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (22/4).

Dalam pemeriksaan tersebut, Ali menjelaskan tim penyidik mendalami perihal keterlibatan PT EKI dalam pengadaan APD di Kemenkes.

PT EKI merupakan perusahaan pemilik APD yang menyuplai barang ke PT Permana Putra Mandiri (PPM). Adapun PT PPM adalah perusahaan yang ditunjuk langsung untuk menyuplai APD oleh pemerintah dalam hal ini gugus tugas dalam keadaan darurat pandemi Co-

aset-aset bernilai ekonomis dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menjelaskan nilai anggaran proyek mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD. Sudah ada transaksi pembelian

kan namun belum disampaikan KPK kepada publik.

Semua itu akan diinformasikan KPK bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka. (*)

Jadi Irup Pada Upacara Kesadaran Nasional, Pj Walikota Baubau Ingatkan Akan Segera melakukan Evaluasi Kinerja Pada OPD



Pj Walikota baubau Dr Rasman Manafi usai menghadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional di Pelataran kantor Walikota Baubau di Palagimata

Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat memberikan sambutan pada kegiatan upacara kesadaran nasional, Rabu (17/4/2024) bertempat di Lapangan Upacara Palagimata, Kantor Wali Kota Baubau mengatakan, saat ini sudah masuk pada selesainya penyelenggaraan kegiatan triwulan ke III, Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) maka setiap kepala OPD/Unit, setiap pejabat fungsional dan struktural itu harus diukur kinerja triwulannya. Ini dilakukan semata-mata untuk memastikan pencapaian perjanjian yang telah ditandatangani pada setiap orang dan perjanjian kinerja unit kerja atau organisasi.

Ini dilakukan secara berjenjang dari pusat ke daerah, dari atas sampai ke bawah.

Menurut Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si, evaluasi kinerja itu ada dua yang substansial. Evaluasi kerja terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan evaluasi kinerja dukungan manajemen. Evaluasi kinerja yang substansial sudah banyak diketahui pencapaiannya yaitu realisasi anggaran, realisasi fisik, sampai on the tracknya kegiatan itu.

Sementara dukungan manajemen itu

merupakan evaluasi tentang organisasi, termasuk didalamnya evaluasi kinerja personel. Jadi, evaluasi kinerja personel itu selain mengacu ke SKP juga berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.

Termasuk tentang etika, loyalitas, disiplin dan ini akan terus menjadi bagian yang akan selalu dilakukan. "Mungkin selama ini dianggap sebagai formalitas semata, tetapi bagi saya itulah sesungguhnya yang menjadi kunci jalannya penyelenggara pemer-

intahan. Walaupun nilai SKP nya 95 tapi ternyata kedisiplinannya rendah maka sesungguhnya nilai itu bisa dikoreksi oleh kepala OPD atau atasan langsungnya. Jadi nanti kita akan lihat sampai sejauh mana atas langsung melakukan evaluasi kinerja dari bawahnya." Kenapa ini harus kita lakukan, karena ini adalah amanah undang-undang. Aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya itu diatur oleh undang-undang dan aturan turunan dibawahnya. Jadi mo-

hon ini menjadi perhatian kita semua, mudah-mudahan setelah kita bersama-sama sistem kerja di aparat Pemerintah Kota Baubau sudah on the track. Karena bagi saya, kinerja yang sudah sesuai dengan aturan ukurannya adalah menjalankan aturan,"katanya.

Pada kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si, menyampaikan permohonan maaf lahir dan bathin karena baru saja melaksanakan ramadhan yang kemudian dilanjutkan dengan Idul Fitri. "Ini merupakan kesempatan yang tepat kepada aparat Pemerintah Kota Baubau yang hadir pada upacara pagi ini saya ucapkan maaf lahir dan bathin atas nama pribadi, keluarga dan sebagai Pj. Wali Kota Baubau sejak 25 September 2023 memegang amanah ini sampai dengan hari ini,"tutupnya. (*)

Hadiri Pesta adat Kasambu-Sambu Kolese, Pj Wali Kota Baubau Dr Rasman Janji Prioritaskan Kebutuhan Perbaikan Jalan



Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP-Ratusan warga Kelurahan Kolese yang tumpah di lapangan Kelurahan Kolese Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau menyambut meriah respon Pj Wali Kota Baubau, Dr Muh Rasman Manafi SP MSi untuk memprioritaskan perbaikan jalan yang diminta perwakilan warga.

"Saya perintahkan kepada tim anggaran untuk menyiapkan anggaran perbaikan jalan di kelurahan kolese yang kabarnya terakhir diaspal 10 tahun lalu. Konek-

sifitas sebuah kota sangat penting dan masalah ini sudah terlalu lama berlarut-larut," tegas Dr Muh Rasman Manafi saat menghadiri pesta adat Kasambu Sambu di lapangan bola Kelurahan Kolese Kecamatan Lea-Lea Minggu (14/4/2024).

Di dalam acara tahunan yang sudah digelar turun-temurun di kawasan ini, Dr Muh Rasman Manafi yang hadir bersama Ibu Reffiani Dwi-atmo Rasman menguraikan keutamaan Tanah Wolio dengan budaya Maritimnya yang sudah teruji.

Bahasa dan adat istiadat yang berkembang di Tanah Wolio menurutnya adalah bukti kekuatan yang harus terus dijaga dan dilestarikan.

Uniknya dalam kegiatan ini, 3 orang MC yang tampil adalah tokoh-tokoh senior di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yaitu Asisten 1 La Ode Aswad, S.Sos, M.Si, Asisten 2 Dra Hj Asmahani, M.Si, dan Asisten 3 La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si. Mereka tampil dalam busana adat dan secara piawai menuntun acara hingga selesai. (*)

Gerak Cepat Kominfo Baubau, Usulan BTS Baubau di ACC Sekda dan Kadis Kominfo Sultra

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Setelah menjadi 5 besar skala prioritas Rakortekbang pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Sultra yang digelar Rabu pagi tadi (17/4) di Claro Hotel Kendari, Kadis Kominfo Kota Baubau dan jajarannya langsung bergerak cepat membawa proposal pembangunan BTS Kota

Baubau yang telah ditandatangani Pj. Wali Kota Baubau, Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., M.Si, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Kadis Kominfo Kota Baubau H. Andi Hamzah, S.Sos., M.Si dan jajarannya diterima langsung Sekda Prov. Sultra, H. Asrun Lio, Ph.D, di kantor Gubernur Sultra, sekitar pukul 11.00 wita. Sekda Sultra didam-

pingi langsung Asisten II Setda Sultra "Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si.

Sekda Asrun Lio mengemukakan usulan Wali Kota Baubau tentang pembangunan BTS tidak sekedar untuk mengatasi zona blankspot dan menjadikan Baubau sebagai kota yang mampu melayani percepatan kemajuan teknologi di kawasan Kepulauan Buton, sehingga pro-

posal usulan ini segera ditangani secara teknis.

"Baubau itu kota sentral, harus ditindaklanjuti, dan teman-teman Kominfo Kota Baubau agar segera mendiskusikan secara teknis dengan Diskominfo Sultra, apalagi sudah masuk dalam usulan prioritas di Rakortekbang Sultra," ujar Asrun Lio.

Pada kesempatan ini



Kadis Kominfo Kota Baubau H. Andi Hamzah, S.Sos., M.Si dan jajarannya diterima langsung Sekda Prov. Sultra, H. Asrun Lio, Ph.D,

Sekda Sultra langsung mendisposisi surat dan proposal usulan untuk diproses oleh Kadis Kominfo Sultra.

Usai menghadap Sekda, Kadis Kominfo Kota Baubau dan jajarannya langsung bertemu Kadis Kominfo Sultra, Dr. Ridwan Badallah, dan diterima di ruang kerjanya sekitar pukul 13.00 wita.

Ridwan Badallah setelah menerima disposisi Sekda Sultra tersebut, mengemukakan bila usulan pembangunan BTS Kota Baubau tidak hanya

diprioritaskan pada anggaran tahun 2025, tetapi dengan disposisi tersebut, maka usulan ini diupayakan masuk pada anggaran perubahan tahun 2024.

"Kondisi Baubau sangat kami perhatikan, dan kami juga memahami kondisi topografi dan teknis pembangunannya. Karena itu, usulan pembangunan BTS untuk mengatasi beberapa kawasan Blnkspot Kota Baubau, diusulkan dalam dua bentuk penanganan. Pertama

masuk dalam perubahan anggaran tahun 2024, dan juga tetap masuk diusulan prioritas pembangunan 2025. Karena kondisi Blankspot ini ada di beberapa titik yang saling berjauhan," kata Dr. Ridwan Badallah. "Intinya segera kami tangani, surat telaahan usulan kepada Gubernur Sultra juga segera kami buat, dan rencananya besok menghadap Sekdra, tentang percepatan usulan ini," imbuh Ridwan. (**)